

ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SUPIORI

Vita Nurrohmah¹

Halomoan Hutajulu²
halomoan.h@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Dana Perimbangan and Dana Otonomi Khusus (Special Autonomy Funds) on economic growth in Supiori Regency. Dana Perimbangan, which consists of the General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH), and Special Allocation Fund (DAK), along with Special Autonomy Funds (Otsus), are transfers from the central government to support regional development and welfare. This research uses a quantitative approach with secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Supiori Regency for the period 2010-2023. Multiple linear regression analysis was used to examine the influence of the independent variables on the dependent variable, namely economic growth, which is measured by the Gross Regional Domestic Product (GRDP). The results of the study indicate that Dana Perimbangan has a positive and significant impact on economic growth in Supiori Regency, with an increase in Dana Perimbangan significantly raising the region's GRDP. Conversely, Special Autonomy Funds have a negative and significant impact on economic growth, indicating that increased Otsus funds do not optimally contribute to local economic growth. Collectively, Dana Perimbangan and Special Autonomy Funds have a significant influence on economic growth in Supiori Regency. These findings emphasize the need for improving the effectiveness of the allocation and management of Special Autonomy Funds to maximize their contribution to regional economic development.

Keywords: Economic Growth, Balancing Fund, and Special Autonomy Fund

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah. Pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah mendorong inovasi dan kompetisi sehat antar daerah, yang berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, otonomi daerah juga mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada secara lebih efektif. Dalam konteks ini, teori keuangan publik menjadi landasan utama dalam memahami pengaruh dana perimbangan dan dana otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat pemerintah daerah. Salah satu teori yang paling relevan adalah Teori Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Musgrave dan Oates, yang menyatakan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk dana perimbangan dan dana otonomi khusus, dapat meningkatkan otonomi fiskal daerah dan mendorong pengembangan ekonomi lokal. Desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sendiri sering diukur melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu total nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun,

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

² Staf Dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

di mana peningkatan PDRB dari tahun ke tahun menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang dapat diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Namun, berdasarkan tinjauan perekonomian yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Supiori pada tahun 2023, fakta di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh berbeda dari harapan teoretis tersebut. Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Supiori tidak pernah melebihi angka 5 persen. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,33 persen, yang tergolong moderat. Namun, memasuki tahun 2020 dan 2021, terjadi perlambatan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan masing-masing hanya 1,07 persen dan 1,56 persen, sebuah penurunan drastis yang antara lain disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional maupun lokal. Tahun 2022 menunjukkan sedikit peningkatan, dengan laju pertumbuhan mencapai 2,93 persen, memberikan harapan akan pemulihan ekonomi. Akan tetapi, pada tahun 2023, pertumbuhan kembali melambat menjadi hanya 1,90 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa perbaikan ekonomi di Kabupaten Supiori pada tahun 2023 tidak sebesar peningkatan yang terjadi pada tahun sebelumnya, dan yang lebih mengkhawatirkan, pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif ini menandakan adanya tantangan struktural yang serius dalam memanfaatkan alokasi dana perimbangan dan dana otonomi khusus secara optimal. Menurut Shah dan Thompson, efektivitas desentralisasi fiskal sangat bergantung pada kualitas institusi lokal, kemampuan administratif, dan mekanisme akuntabilitas. Jika faktor-faktor ini tidak terpenuhi, maka dampak positif dari dana perimbangan dan otonomi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah mungkin tidak akan tercapai secara maksimal. Keterkaitan antara fenomena fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Supiori dan teori desentralisasi fiskal terletak pada pengelolaan dana yang diterima oleh pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan dana tersebut dengan baik untuk mendukung sektor-sektor produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Mengenai komposisi pendapatan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Supiori terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan dana lainnya termasuk Dana Otonomi Khusus. Dana Perimbangan sendiri merupakan transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, dana ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan mendukung pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Dana Otonomi Khusus diberikan untuk mendukung pembangunan daerah dengan kebutuhan khusus, termasuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus yang baik memungkinkan daerah untuk meningkatkan layanan publik dan infrastruktur, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada tahun 2022, Kabupaten Supiori menerima DAU sebesar Rp150 miliar pada tahun 2021, dengan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, tantangan utama dalam pemanfaatan dana ini adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengalokasikannya secara efektif untuk pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor produktif. Sayangnya, tren penggunaan Dana Perimbangan di Supiori menunjukkan bahwa sebagian besar dana masih terserap untuk belanja rutin, terutama gaji pegawai dan operasional pemerintahan. Hal ini menyebabkan alokasi untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, menjadi sangat terbatas. Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Supiori masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas belanja publik.

Sementara itu, Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan instrumen penting lainnya dalam upaya pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan daerah dengan kebutuhan khusus, termasuk di Papua. Kabupaten Supiori menjadi salah satu penerima Dana Otsus, yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Menurut data dari Bappeda Papua pada tahun 2023, Kabupaten Supiori menerima Dana Otsus sebesar Rp50 miliar pada tahun 2021. Namun, tantangan dalam pengelolaan Dana Otsus ini juga tidak kalah beratnya, terutama rendahnya serapan anggaran di beberapa sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori tahun 2023, meskipun

alokasi dana untuk sektor pendidikan meningkat, hasilnya belum optimal karena kendala dalam pelaksanaan program dan kurangnya pengawasan. Hal serupa terjadi di sektor kesehatan, di mana meskipun ada peningkatan alokasi Dana Otsus untuk pembangunan fasilitas kesehatan, kualitas layanan masih belum sesuai harapan masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan evaluasi dari Bappeda Papua pada tahun 2022, salah satu masalah utama dalam pemanfaatan Dana Otsus di Supiori adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan alokasi dana tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, sehingga program-program yang dilaksanakan tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan. Secara keseluruhan, tren penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Otsus di Kabupaten Supiori menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun peningkatan alokasi dana ini belum diimbangi dengan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Misalnya, meskipun alokasi Dana Perimbangan dan Dana Otsus meningkat pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Supiori tetap fluktuatif dengan laju pertumbuhan hanya mencapai 1,90 persen pada tahun 2023. Hal ini dengan tegas menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pemanfaatan kedua dana tersebut bukan terletak pada jumlah dana yang diterima, melainkan pada efektivitas pengelolaannya. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata kelola keuangan agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, serta perlu ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, agar alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun masih terdapat celah penelitian yang penting. Hidayat dan Sugiyanto (2020) mengungkapkan bahwa dana perimbangan berperan signifikan dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun pengaruh tersebut lebih terlihat pada daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi. Fitriani (2021) dalam penelitiannya menyoroti peran dana otonomi khusus di Provinsi Papua dan menemukan bahwa meskipun dana ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masih terbatas. Penelitian oleh Rachmawati (2019) menekankan pentingnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah dalam memaksimalkan manfaat dari dana perimbangan dan otonomi khusus, yang menggarisbawahi bahwa kapasitas institusional sangat penting dalam mempengaruhi efektivitas penggunaan dana tersebut. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih terfokus pada dampak individu dari dana perimbangan atau dana otonomi khusus secara terpisah. Penelitian yang menggabungkan analisis kedua dana tersebut secara simultan dan spesifik di daerah dengan karakteristik unik seperti Kabupaten Supiori masih sangat jarang dilakukan. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas penggunaan dana perimbangan dan dana otonomi khusus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah otonomi khusus seperti Kabupaten Supiori. Dengan alokasi dana yang terus meningkat setiap tahun, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan analisis dana perimbangan dan dana otonomi khusus dalam konteks Kabupaten Supiori, daerah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang khas, serta memasukkan analisis kapasitas institusi lokal dan bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas penggunaan dana tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada literatur mengenai desentralisasi fiskal dan pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai pentingnya kapasitas institusional dalam memaksimalkan manfaat dari transfer fiskal. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan dan dana otonomi khusus memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah otonomi khusus seperti Kabupaten Supiori, namun efektivitas penggunaan dana tersebut sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan kapasitas institusional di tingkat lokal. Dengan mengidentifikasi celah dalam penelitian terdahulu dan urgensi penelitian ini, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Supiori.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan lokasi di Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa deret waktu (time series) dari tahun 2010 hingga 2023 yang diperoleh melalui metode dokumentasi dan studi kepustakaan, meliputi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, publikasi BPS Kabupaten Supiori, serta berbagai literatur terkait. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan model double log (log-linear) menggunakan perangkat lunak Eviews 12, di mana model regresinya dinyatakan sebagai :

$$\text{Ln PDRB} = \text{Ln } a_0 + a_1 \text{ Ln DP} + a_2 \text{ Ln DO} + u$$

Dimana variabel dependen (Y) adalah pertumbuhan ekonomi yang diprosikan dengan PDRB, sedangkan variabel independennya adalah Dana Perimbangan (X₁) dan Dana Otonomi Khusus (X₂). Dalam model ini, seluruh variabel ditransformasikan ke dalam log natural (Ln) sehingga koefisien regresi yang dihasilkan dapat langsung diinterpretasikan sebagai nilai elastisitas. Sebelum analisis regresi dilakukan, terlebih dahulu diuji asumsi klasik yang mencakup uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji signifikansi parsial (uji t), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R-squared), dengan seluruh variabel diukur dalam skala rasio.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian diawali dengan serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimation (BLUE).

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terbentuk adanya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas. Nilai korelasi yang dapat ditoleransi dalam uji multikolinearitas adalah kurang dari 90 persen atau <0,9. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Ln PDRB	Ln Dana Perimbangan	Ln Dana Otonomi Khusus
Ln PDRB	1.000000	0.822363	0.066067
Ln Dana Perimbangan	0.822363	1.000000	0.433044
Ln Dana Otonomi Khusus	0.066067	0.433044	1.000000

Sumber: data diolah (2024)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan hubungan antara variabel PDRB, Dana Perimbangan, dan Dana Otonomi Khusus. Korelasi antara PDRB dan Dana Perimbangan sebesar 0.822 mengindikasikan hubungan positif yang kuat, sementara hubungan antara PDRB dan Dana Otonomi Khusus sangat lemah dengan korelasi 0.066. Korelasi antara Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus sebesar 0.433 menunjukkan hubungan moderat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas yang serius karena tidak ada korelasi yang mendekati 0.9 atau lebih.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Jika nilai prob nya < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas, sedangkan jika nilai prob > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode White disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Heteroskedastis

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	0.087282	Prob. F(4,9)	0.9842
Obs*R-squared	0.522808	Prob. Chi-Square(4)	0.9712
Scaled explained SS	0.143069	Prob. Chi-Square(4)	0.9976

Sumber: data diolah (2024)

Dari hasil uji heteroskedastisitas dengan metode White, dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas F-statistic sebesar 0.9842, yang jauh di atas level signifikansi 0.05. Begitu pula dengan nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar 0.9712 dan Scaled explained SS sebesar 0.9976, yang semuanya menunjukkan bahwa model tidak mengindikasikan adanya masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas terpenuhi dalam model ini.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Hasil uji autokorelasi dengan uji Breusch-Godfrey disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.339046	Prob. F(2,9)	0.3097
Obs*R-squared	3.210566	Prob. Chi-Square(2)	0.2008

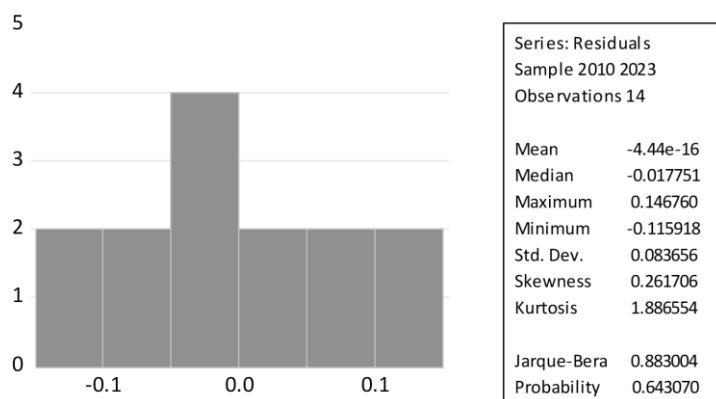
Sumber: data diolah (2024)

Dari hasil uji autokorelasi di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian. Ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas F-statistic sebesar 0.3097 dan nilai probabilitas Obs*R-squared sebesar 0.2008, yang keduanya jauh di atas tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian, model tidak menunjukkan adanya masalah autokorelasi pada residual hingga 2 lag.

d. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas disajikan pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Uji Normalitas



Sumber: data diolah (2024)

Hasil uji normalitas residual dengan menggunakan uji Jarque-Bera menunjukkan bahwa hipotesis nol, yaitu residual mengikuti distribusi normal, diterima. Nilai probabilitas dari uji Jarque-Bera adalah 0.505428 (dalam gambar asli disebutkan 0.643070, namun dari tabel di atas menunjukkan

0.505428), yang jauh di atas tingkat signifikansi 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa residual dari model tidak memiliki penyimpangan signifikan dari distribusi normal. Skewness sebesar 0.261706 dan kurtosis sebesar 1.886554 juga mendukung kesimpulan bahwa distribusi residual tidak jauh dari distribusi normal.

Berdasarkan serangkaian uji asumsi klasik yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibangun telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menghasilkan estimasi yang valid dan reliabel. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen karena seluruh koefisien korelasi berada di bawah batas toleransi 0,9, sehingga model bebas dari masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dengan metode White menghasilkan nilai probabilitas yang jauh di atas taraf signifikansi 0,05, yang berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau dengan kata lain varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas). Uji autokorelasi dengan uji Breusch-Godfrey juga menunjukkan nilai probabilitas di atas 0,05, sehingga dinyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antar residual pada periode waktu yang berbeda atau model bebas dari autokorelasi. Terakhir, uji normalitas dengan uji Jarque-Bera menghasilkan nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05, yang mengindikasikan bahwa residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik yaitu tidak adanya multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, serta normalitas residual, maka model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak dan dapat diandalkan untuk melanjutkan ke tahap pengujian hipotesis serta interpretasi hasil lebih lanjut.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tab 4 berikut.

Tabel 4. Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: LN_PDRB
 Method: Least Squares
 Date: 08/27/24 Time: 12:45
 Sample: 2010 2023
 Included observations: 14

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.680037	3.466883	2.215257	0.0488
LN_DANAPERIMBANGAN	0.885949	0.142334	6.224415	0.0001
LN_DANAOTONOMIKHUSUS	-0.173876	0.076445	-2.274524	0.0440
R-squared	0.779830	Mean dependent var		27.21866
Adjusted R-squared	0.739799	S.D. dependent var		0.178285
S.E. of regression	0.090943	Akaike info criterion		-1.769755
Sum squared resid	0.090977	Schwarz criterion		-1.632814
Log likelihood	15.38828	Hannan-Quinn criter.		-1.782431
F-statistic	19.48071	Durbin-Watson stat		0.896996
Prob(F-statistic)	0.000243			

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda tersebut, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Ln PDRB} = 7.680037 + 0.885949 \text{ Ln Dana Perimbangan} - 0.173876 \text{ Ln Dana Otonomi Khusus}$$

Dari persamaan regresi ini, dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 7.68 menyatakan bahwa apabila variabel Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dianggap konstan (bernilai nol), maka nilai PDRB adalah 7.68. Nilai koefisien regresi variabel Dana Perimbangan sebesar 0.885949 dengan tanda positif menunjukkan bahwa jika Dana Perimbangan naik sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka PDRB diperkirakan akan meningkat sebesar 0.885949 satuan. Nilai koefisien regresi variabel Dana Otonomi Khusus sebesar -0.173876 dengan tanda negatif

menunjukkan bahwa jika Dana Otonomi Khusus naik sebesar 1 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan, maka PDRB diperkirakan akan turun sebesar 0.173876 satuan.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Variabel secara Individu (Uji-t)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 3 di atas, Dana Perimbangan memiliki nilai t-hitung sebesar 6.224 dengan probabilitas 0.0001. Karena probabilitas ini < 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Supiori. Dana Otonomi Khusus memiliki nilai t-hitung sebesar -2.275 dengan probabilitas 0.0440. Karena probabilitas ini < 0.05 , maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Otonomi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Supiori.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Hasil uji F yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Nilai F-statistic sebesar 19.48071 dan nilai probabilitas (Prob(F-statistic)) sebesar 0.000243, yang jauh di bawah 0.05, menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu PDRB. Dengan kata lain, Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Supiori.

c. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R-squared sebesar 0.779830. Ini berarti bahwa sekitar 77.98% variasi dalam variabel dependen, yaitu PDRB, dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus. Sisanya, sekitar 22.02%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.739799 mengindikasikan bahwa setelah memperhitungkan jumlah variabel dalam model, model ini masih cukup kuat dalam menjelaskan variasi PDRB.

B. Pembahasan

1. Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menempatkan pentingnya kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah pusat memberikan dukungan melalui transfer Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah, yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan berperan penting dalam mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan memperkuat kapasitas keuangan daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih rendah. Hasil uji regresi dalam penelitian ini membuktikan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Supiori. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman, dkk (2022) yang menemukan bahwa variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan sebesar 72% terhadap pertumbuhan ekonomi, serta penelitian Nugraheni (2014) yang menunjukkan bahwa komponen Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.

2. Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Supiori. Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi Dana Otsus belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal, bahkan peningkatan dana justru berasosiasi dengan penurunan PDRB. Hal ini sejalan dengan penelitian Duwith dan Ciptono (2010) yang menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kurangnya fokus pengalokasian dana pada sektor produktif, rendahnya kapasitas manajerial dan perencanaan pemerintah daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

3. Analisis Pengaruh Simultan Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus

Hasil uji F yang sangat signifikan membuktikan bahwa Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus secara bersama-sama memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Supiori. Temuan ini konsisten dengan penelitian Pudji (2015) yang menunjukkan bahwa kedua dana tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Papua. Namun, peningkatan efektivitas penggunaan Dana Otsus menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi berkala, penyesuaian strategi alokasi anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan agar alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada akhir penelitian ini dapat ditarik tiga kesimpulan utama.

Pertama, Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Supiori. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Supiori. Dengan koefisien regresi positif dan nilai probabilitas yang jauh di bawah 0,05, peningkatan Dana Perimbangan terbukti berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini berarti semakin besar Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Supiori, semakin besar pula pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Kedua, Dana Otonomi Khusus memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Supiori. Meskipun alokasi Dana Otsus meningkat setiap tahunnya, hasil uji regresi menunjukkan bahwa dana ini tidak berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan koefisien regresi negatif dan nilai probabilitas di bawah 0,05, peningkatan Dana Otsus justru berhubungan dengan penurunan PDRB. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi dana tersebut belum optimal atau belum tepat sasaran, serta mencerminkan adanya tantangan dalam pengelolaan dan efektivitas penggunaan dana otonomi khusus di Kabupaten Supiori.

Ketiga, secara bersama-sama, Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Supiori. Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sangat signifikan secara statistik, dengan nilai probabilitas jauh di bawah 0,05. Hal ini membuktikan bahwa kedua variabel independen, yaitu Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus, secara simultan mempengaruhi variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Supiori. Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa variabel fiskal seperti Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Dengan demikian, meskipun Dana Otsus secara parsial menunjukkan pengaruh negatif, namun secara simultan kedua dana ini tetap menjadi instrumen penting yang mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Supiori.

2. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang disampaikan di atas, terdapat empat saran utama yang diajukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Supiori. *Pertama*, pemerintah daerah disarankan meningkatkan efisiensi penggunaan Dana Perimbangan dengan memprioritaskan proyek infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan serta melakukan pengawasan ketat dan evaluasi berkala terhadap setiap program yang dibiayai. *Kedua*, terkait Dana Otonomi Khusus yang menunjukkan pengaruh negatif, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian kebijakan dengan memfokuskan dana pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM, serta memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. *Ketiga*, pemerintah daerah disarankan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan

dan potensi lokal. *Keempat*, untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempromosikan investasi di sektor-sektor unggulan, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta memberikan kemudahan perizinan guna menarik investor lokal dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvaro, R. 2022. Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH, dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten daerah tertinggal. *Jurnal Budget*, 7(2).
- Argo, A. P., & Nuraini, I. 2017. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(2), 163-175.
- Azzahra, A. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2011-2012. [Disertasi doktoral, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Supiori. 2019-2023. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Supiori. BPKAD Supiori.
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Papua. 2022. Laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah Kabupaten Supiori. BPK Papua.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Supiori. 2020-2023. Produk domestik regional bruto Kabupaten Supiori menurut lapangan usaha dan pengeluaran. BPS Supiori.
- Bappeda Papua. 2023. Evaluasi pemanfaatan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten Supiori. Bappeda Provinsi Papua.
- Duwith, R. (2010). Pengaruh dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua tahun 2002-2009. [Disertasi doktoral, Universitas Gadjah Mada].
- Duwith, R., & Ciptono, W. S. 2010. Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 45-60.
- Fatimah, S. 2017. Analisis Dana Perimbangan kaitannya dengan percepatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat tahun 2012-2016. *Journal of Economics and Business*, 3(2), 61-78.
- Fitriani, A. 2021. Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap pembangunan di Papua: Sebuah evaluasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(1), 67-82.
- Fusanto, A. 2018. Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dengan belanja daerah sebagai variabel intervening [Disertasi doktoral, Universitas Sumatera Utara].
- Gafar, A. A. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap kinerja keuangan serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Studi pada kabupaten dan kota Provinsi Maluku Utara 2014-2018). [Disertasi doktoral, Universitas Islam Indonesia].
- Hartono, F. W. (2012). Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan belanja daerah sebagai variabel intervening. Universitas Atma Jaya.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020-2023). Alokasi Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua. Kementerian Keuangan.
- Kusuma, F. 2021. Peran Dana Perimbangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 22-35.
- Laoh, O. E. H., & Pakasi, C. B. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 14(1), 199-206.
- Lauma, K., Rotinsulu, D. C., & Maramis, M. T. B. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(3).
- Nugraheni, D. R. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 12(3), 45-60.

- Permanasari, W. A., Cahyono, Y. T., & MM, A. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi kasus kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2011). [Disertasi doktoral, Universitas Muhammadiyah Surakarta].
- Putri, L. P. M. A., Susanti, J., & Aryaningsih, N. N. 2023. Pengaruh Dana Perimbangan dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. [Disertasi doktoral, Politeknik Negeri Bali].
- Rahman, A. G., Dai, S. I. S., & Santoso, I. R. 2022. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal: Studi kasus di Provinsi Papua. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(2), 88-103.
- Rahmah, A. R., & Zein, B. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 213-220.
- Rawung, S. S., Poluakan, T. C., & Hamenda, B. 2023. The effect of regional original revenue, general allocation funds, and special allocation funds on economic growth in the North Sulawesi Province. *Jambura Equilibrium Journal*, 5(2), 73-79.
- Septia, R. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi: Studi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2014. [Disertasi doktoral, Universitas Widyatama].
- Setiawan, I., & Zainuddin, A. 2021. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota. *Jurnal Kebijakan Publik*, 16(2), 112-129.
- Sjafrizal. 2018. *Ekonomi wilayah dan perencanaan pembangunan wilayah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sriningsih, D. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Karesidenan Surakarta tahun 2003-2011. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suandi, I. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. [Disertasi doktoral, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar].
- Suhendra, E. 2019. Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi: Peran Dana Alokasi Khusus dalam pembangunan daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 14(2), 55-72.
- Uhise, S. 2013. Dana Alokasi Umum (DAU): Pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dengan belanja modal sebagai variabel intervening. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 1650-1768.
- Wibowo, M. 2020. Pengelolaan Dana Perimbangan dan dampaknya pada pembangunan daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 19(3), 78-91.
- Wibowo, M., & Yudhoyono, B. 2019. Evaluasi penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk pengembangan ekonomi di Provinsi Papua dan Papua Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 7(2), 45-58.
- Wulandari, A., & Suropto, B. 2020. Efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan infrastruktur daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 9(3), 64-79.
- Zainuri. 2022. *International economics today: Global economic challenges pandemic crisis war and sustainability issue*. PT Frost Yuniior.